



## STRATEGI KESIAPAN PASUKAN TNI DALAM MENDUKUNG TUGAS OPERASI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DUNIA (Studi Kasus Satgas Yonmek TNI XXIII-Q/UNIFIL Periode 2023–2024)

**Febriyanto Tri Dewantoro<sup>1</sup>, Ferdinand Hasudungan Siagian<sup>2</sup>, Oktaheroe Ramsi<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Pertahanan Republik Indonesia

\*[febriyanto@gmail.com](mailto:febriyanto@gmail.com)

*Korespondensi penulis: [febriyanto@gmail.com](mailto:febriyanto@gmail.com)*

**Abstract.** Partisipasi Tentara Nasional Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan implementasi amanat konstitusi sekaligus instrumen diplomasi pertahanan Indonesia. Salah satu kontribusi tersebut diwujudkan melalui penugasan Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-Q/UNIFIL di Lebanon Selatan periode 2023–2024. Kompleksitas lingkungan operasi, ancaman multidimensional, dinamika sosial masyarakat lokal, serta tuntutan interoperabilitas internasional menuntut kesiapan pasukan yang optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan persiapan komponen personel pasukan TNI dan merumuskan strategi kesiapan pasukan dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia pada misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyiapan personel telah dilaksanakan melalui tahapan seleksi, pre-deployment training, orientasi penugasan, serta pengujian kesiapan operasional sesuai standar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan PMPP TNI. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala berupa keterbatasan kemampuan bahasa asing, disparitas kualitas pelatihan antar satuan, kesiapan psikologis personel, serta keterbatasan alutsista dan dukungan logistik. Strategi kesiapan pasukan TNI perlu diarahkan pada penguatan kompetensi sumber daya manusia, standarisasi pelatihan berbasis standar PBB, modernisasi alutsista, penguatan interoperabilitas multinasional, dan pembangunan sistem dukungan logistik yang berkelanjutan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan mandat UNIFIL sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara kontributor utama pasukan perdamaian dunia.

**Kata Kunci :** Strategi Pertahanan, Kesiapan Pasukan, UNIFIL, Peacekeeping Operations, Satgas Yonmek.

**Abstrak.** Indonesia's participation in United Nations Peacekeeping Operations represents the implementation of its constitutional mandate and defense diplomacy policy. One of these contributions is reflected in the deployment of the Indonesian Mechanized Battalion Task Force XXIII-Q/UNIFIL in Southern Lebanon during the 2023–2024 period. The complexity of the operational environment, multidimensional threats, local socio-political dynamics, and international interoperability requirements demand a high level of troop readiness. This study aims to analyze the preparation of military personnel and formulate troop readiness strategies to support peacekeeping operations under the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). The research employed a descriptive qualitative method using observation, in-depth interviews, and document analysis. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model. The findings indicate that personnel preparation has been conducted through a structured process consisting of personnel selection, pre-deployment training, mission orientation, and operational readiness assessment in accordance with United Nations and PMPP TNI standards. Nevertheless, several challenges remain, including limited foreign language proficiency, disparities in training quality among military units, psychological readiness issues, and limitations in equipment and logistics support. Therefore, troop readiness strategies should focus on strengthening human resource competencies, standardizing UN-based training systems, modernizing military equipment, enhancing multinational interoperability, and improving



---

sustainable logistics support. These strategies are expected to increase mission effectiveness and strengthen Indonesia's role as a major contributor to global peacekeeping operations.

**Keywords:** Defense Strategy, Troop Readiness, UNIFIL, Peacekeeping Operations, Mechanized Battalion.

## 1. LATAR BELAKANG

Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD) merupakan salah satu instrumen utama Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga stabilitas keamanan internasional. Sejak pengiriman Kontingen Garuda pertama ke Mesir pada tahun 1957, Indonesia secara konsisten berpartisipasi dalam berbagai misi perdamaian dunia sebagai implementasi politik luar negeri bebas aktif dan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Indonesia termasuk salah satu negara penyumbang pasukan terbesar dalam operasi perdamaian PBB. Keterlibatan tersebut tidak hanya memberikan kontribusi terhadap stabilitas global, tetapi juga menjadi sarana diplomasi pertahanan yang memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.

Salah satu misi yang masih berlangsung hingga saat ini adalah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Dalam misi tersebut, Indonesia menugaskan Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-Q/UNIFIL yang berkekuatan sekitar 850 personel dan bertanggung jawab mengamankan wilayah sektor timur Lebanon Selatan seluas kurang lebih 84 kilometer persegi dengan pengawasan Blue Line sepanjang 4,7 kilometer yang berbatasan langsung dengan Israel.

Dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, ditemukan sejumlah kendala yang mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi ideal yang seharusnya (das Sollen) dan kenyataan yang terjadi (das Sein). Dalam konteks SDM, SDM TNI yang dikirim ke misi perdamaian seharusnya memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam hal kemampuan teknis militer, pemahaman hukum humaniter internasional, komunikasi lintas budaya dan bahasa, serta kesiapan psikologis dan fisik untuk menghadapi dinamika di wilayah misi (das Sollen). Hal ini telah ditegaskan dalam berbagai dokumen resmi PBB seperti Core Pre-deployment Training Materials (CPTM) dan Specialized Training Materials (STM), serta Standar Pelatihan dari PMPP TNI. Namun dalam realitasnya (das Sein), berbagai kendala masih ditemukan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan penguasaan bahasa asing, terutama Bahasa Inggris dan Arab Lebanon. Meskipun sebagian besar personel telah menerima pelatihan dasar bahasa, namun keterampilan aktif dalam percakapan operasional, negosiasi, atau koordinasi sering kali belum memadai. Hal ini berdampak signifikan terhadap efektivitas komunikasi dengan elemen lain dalam misi seperti LAF, UN Agencies, maupun masyarakat lokal.

- a. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Lebanon adalah Bahasa Arab Lebanon yang berbeda dengan Bahasa Arab yang umumnya dipelajari di Indonesia. Selain itu hanya sedikit masyarakat Lebanon yang dapat berbahasa Inggris secara aktif sehingga setiap kegiatan Satgas yang melibatkan Masyarakat lokal memerlukan pendampingan LA (Language Assistant). Kendala bahasa ini juga ditemui saat kegiatan-kegiatan latihan atau patroli bersama LAF karena hanya sebagian personel LAF yang memiliki kemampuan Bahasa Inggris.

- 
- b. Kemampuan bahasa Inggris personel TOC Indobatt dalam menerjemahkan informasi dari Sektor Timur dan melaporkan baik lisan maupun tulisan kepada Sektor Timur dan sebaliknya laporan informasi dari Indobatt kepada Sektor Timur.
  - c. Keterbatasan personel dalam penguasaan Bahasa Inggris dan Arab sehingga mengurangi kemampuan koordinasi dan negosiasi dalam pelaksanaan tugas.
  - d. Penerjemah dari UN tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tidak menudukung optimal pada kegiatan operasional dan patroli.
  - e. Selain kendala bahasa, terdapat juga disparitas dalam kualitas pelatihan antara satuan-satuan dari berbagai Kotama. Kebijakan desentralisasi pelatihan pramisi ke masing-masing Kotama, meskipun dimaksudkan untuk memperluas keterlibatan, justru menimbulkan tantangan dalam standarisasi kemampuan. Sebagian Kotama tidak memiliki fasilitas pelatihan, pelatih bersertifikasi PBB, atau modul pelatihan mutakhir, sehingga personel yang diberangkatkan tidak sepenuhnya memenuhi standar operasional internasional.

Menurut UN DPKO (United Nations Department of Peacekeeping Operations, 2017), pelatihan pramisi yang komprehensif merupakan salah satu elemen kunci dalam menjamin kesiapan pasukan dan keberhasilan pelaksanaan mandat misi perdamaian (das Sollen). Sedangkan, kondisi saat ini terdapat tantangan signifikan dalam mempersiapkan personel TNI untuk misi pemeliharaan perdamaian, yaitu adanya keterbatasan durasi pelatihan yang dilaksanakan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI (das sein). Pelatihan yang diberikan bersifat teoritis dan tidak cukup mengakomodasi real-life scenario training atau simulasi medan misi. Pelatihan yang berlangsung dalam waktu singkat juga dinilai tidak memberikan ruang yang cukup bagi para prajurit untuk memahami secara mendalam kompleksitas misi, terutama dalam aspek-aspek non-teknis seperti perlindungan sipil, dinamika sosial budaya daerah misi, serta keterampilan komunikasi dalam lingkungan multinasional. Keterbatasan waktu ini juga memengaruhi efektivitas transfer pengetahuan terkait prosedur standar operasional PBB dan skenario situasional yang memerlukan pengambilan keputusan cepat dan tepat di lapangan.

Kurangnya pemahaman terhadap budaya lokal Lebanon, dinamika sektarian, serta aspek perlindungan warga sipil (protection of civilians/PoC) dapat menimbulkan kesalahan dalam interaksi lapangan yang bisa berdampak pada citra misi maupun keselamatan personel. Bahkan kesiapan psikologis menghadapi situasi tak terduga seperti konflik sipil, ancaman dari kelompok bersenjata ilegal, atau tekanan publik di wilayah operasi, masih menjadi titik lemah yang perlu dibenahi secara sistemik.

Sementara itu, dari kesiapan alutsista juga menjadi perhatian krusial dalam menjamin keberhasilan tugas Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-Q/UNIFIL. Secara ideal (das Sollen), alutsista yang digunakan dalam misi PBB harus memenuhi standar interoperabilitas internasional, tahan terhadap intensitas operasional yang tinggi, memiliki tingkat keandalan teknis tinggi, serta mampu mendukung berbagai skenario taktis di lapangan. Hal ini penting mengingat misi UNIFIL menuntut mobilitas tinggi, patroli rutin, hingga kemampuan pengintaian dan perlindungan pasukan dalam situasi darurat.



Namun pada pelaksanaan di lapangan penugasan (das Sein), alutsista yang digunakan di lapangan, seperti kendaraan tempur (Ranpur) dan kendaraan taktis (Ranri), sebagian besar telah memasuki usia pakai yang cukup tua dihadapkan pada frekuensi operasional yang tinggi serta SOP (Standard Operational Procedure) dari UNIFIL. Frekuensi penggunaan yang tinggi tanpa dukungan logistik dan suku cadang yang memadai juga menyebabkan seringnya terjadi gangguan teknis. Hal ini secara langsung berdampak pada efektivitas patroli dan kegiatan operasional lainnya, serta meningkatkan potensi kerawanan terhadap personel.

Selain itu, situasi keamanan yang dinamis dan tidak menentu, termasuk potensi ancaman dari warga sipil yang bersikap agresif terhadap pasukan PBB, semakin menuntut kesiapsiagaan taktis dan psikologis yang tinggi dari seluruh personel. Perilaku yang tidak menyenangkan oleh beberapa kelompok warga sipil terhadap personel UN baik itu yang mengancam secara langsung maupun tidak langsung sewaktu-waktu dapat terjadi kapan saja dan dimana saja di seluruh wilayah AO (Area Operation) UNIFIL. Bahkan terjadi penghadangan, perusakan kendaraan, pemukulan terhadap prajurit yang bertugas, serangan tembakan kepada personel oleh warga di pos pengamanan perbatasan Israel.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kesiapan ideal Satgas TNI (das Sollen) sebagaimana diharapkan oleh PBB dan standar Indonesia, dengan kenyataan di lapangan (das Sein) yang menunjukkan adanya tantangan serius baik dari sisi SDM maupun alutsista. Padahal, menurut United Nations Infantry Battalion Manual (UNIBAM) Vol. I & II (2012), kesiapan satuan batalyon penjaga perdamaian mencakup standar kemampuan individu, kesiapan unit, interoperabilitas, serta dukungan logistik dan alutsista yang memadai.

Lebih lanjut, perubahan kebijakan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir turut menimbulkan ketidakpastian dalam proses seleksi dan pelatihan personel. Terdapat pergeseran tanggung jawab di mana sebagian tahapan seleksi dan pelatihan kini dilaksanakan di Komando Utama (Kotama) masing-masing matra, bukan secara terpusat di PMPP. Meskipun kebijakan desentralisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian Kotama dalam pembinaan pasukan, namun dalam praktiknya menimbulkan disparitas dalam kualitas pelatihan antar Kotama. Hal ini berpotensi menghambat penyamaan standar kompetensi personel yang akan diberangkatkan ke misi PBB, mengingat misi perdamaian menuntut standar interoperabilitas dan kesiapan yang tinggi sesuai dengan pedoman PBB seperti yang tertuang dalam \*United Nations Infantry Battalion Manual (UNIBAM)\* Volume I dan II (2012). Ketidakterpaduan sistem pelatihan ini dikhawatirkan berdampak pada penurunan kualitas pasukan dan efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia di forum multilateral.

Mengacu pada perspektif Samuel P. Huntington mengenai profesionalisme yang ditopang oleh tiga dimensi utama—keahlian (expertise), tanggung jawab (responsibility), dan kebersamaan (corporateness)—prajurit TNI dituntut untuk memiliki kemampuan yang relevan dengan tantangan serta tuntutan tugas yang terus berkembang. Profesionalitas organisasi pada dasarnya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menggerakkannya. Dalam konteks Angkatan Darat, personel militer sebagai alat negara harus mampu beroperasi secara efektif agar dapat memberikan kontribusi maksimal sekaligus memenuhi standar yang berlaku di tingkat internasional. Upaya pemenuhan kebutuhan SDM profesional tidak hanya diarahkan



---

pada penyiapan personel di level strategis, tetapi juga mencakup rekrutmen dan pembinaan Bintara sebagai prajurit yang dipersiapkan dengan keterampilan teknis lapangan serta penguasaan kemampuan khusus sesuai kebutuhan operasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan persiapan komponen personel Satgas Yonmek TNI XXIII-Q/UNIFIL serta merumuskan strategi kesiapan pasukan TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Lebanon.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Teori Ilmu Pertahanan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) dan (2), pertahanan negara dipahami sebagai serangkaian usaha untuk menjaga kedaulatan, melindungi keutuhan wilayah, dan menjamin keselamatan bangsa dari ancaman terhadap eksistensi negara. Sistem pertahanan tersebut bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, serta berakar pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Partisipasi warga negara menjadi hak sekaligus kewajiban dalam mendukung upaya perlindungan negara. Tujuan dari sistem ini adalah memastikan keberlangsungan dan tegaknya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Implementasinya dilakukan melalui pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan penggunaan kekuatan pertahanan yang berpijak pada prinsip demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, peningkatan kesejahteraan umum, serta penciptaan kondisi lingkungan yang aman.

Teori Strategi. Strategi dalam penelitian ini dijadikan sebagai pedoman dalam menganalisis bagaimana upaya atau cara yang dilakukan sebagai suatu strategi dalam peningkatan kesiapan dan pembangunan kemampuan personel dalam penugasan misi pemeliharaan perdamaian dunia khususnya pada operasional UNIFIL di Lebanon. Menurut Lykke, strategi merupakan suatu ekspresi yang konsisten dari proses perumusan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi dapat dipahami sebagai hubungan antara ends (tujuan atau kondisi akhir yang diinginkan), ways (konsep, metode, dan tindakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan), serta means (sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan cara tersebut). Secara sederhana, formulasi ini dapat dirumuskan dalam bentuk matematis: Strategy = Ends + Ways + Means. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjelaskan apa yang ingin dicapai, tetapi juga bagaimana cara mencapainya dan dengan sumber daya apa hal tersebut dapat diwujudkan (Friis, 1996).

Teori Kapabilitas. Menurut Cottey dan Foster (2004), diplomasi pertahanan dipahami sebagai bentuk keterlibatan strategis antarnegara, termasuk dengan pihak yang berpotensi menjadi lawan, yang bertujuan mencegah konflik sekaligus membangun kepercayaan melalui mekanisme confidence building measures (CBM). Inisiatif ini mencakup penguatan kerja sama multilateral di kawasan, pengembangan hubungan sipil-militer yang demokratis, serta peningkatan kapasitas dalam operasi pemeliharaan perdamaian melalui penyusunan doktrin, konsep operasional, pendidikan dan latihan bersama, pengelolaan krisis, serta dukungan logistik dan peralatan. Upaya tersebut penting untuk memastikan adanya standar operasional

yang seragam bagi pasukan penjaga perdamaian, sekaligus mendorong integrasi yang lebih efektif dengan pasukan negara lain maupun aktor terkait. Pengembangan kapabilitas pasukan penjaga perdamaian PBB perlu diselaraskan dengan kompleksitas tugas multidimensional yang mereka hadapi. Aspek yang harus diperhatikan mencakup regulasi sebagai dasar hukum sekaligus jaminan pendanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami konteks wilayah misi serta memiliki keterampilan teknis dan kepemimpinan baik di tingkat komando maupun satuan tugas, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Upaya penguatan kapabilitas ini juga diarahkan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang bersifat volatil, penuh ketidakpastian, kompleks, dan ambigu (VUCA), serta untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko yang berpotensi muncul selama pelaksanaan operasi.

Teori Kemampuan. Morgan (dalam Haryanto, 2014) menjelaskan kapasitas sebagai seperangkat kemampuan yang mencakup keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, perilaku, motivasi, serta kondisi dan sumber daya yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan, maupun sistem yang lebih luas untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka secara efektif. Kapasitas ini juga menjadi landasan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dan terus berkembang dari waktu ke waktu.

Konsep Pelatihan pada Pre-Deployment Training. Goldstsein dan Gressner (dalam Kamil, 2012) menjelaskan bahwa pelatihan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menguasai keterampilan, aturan, konsep, maupun pola perilaku yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja. Sejalan dengan itu, Dearden (dalam Kamil, 2010) menegaskan bahwa pelatihan pada dasarnya mencakup proses belajar mengajar dan praktik yang bertujuan mencapai tingkat kompetensi tertentu serta efisiensi kerja. Hasil dari pelatihan diharapkan membuat peserta mampu memberikan respons yang tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. Pre Deployment Training dapat dipahami sebagai pelatihan bagi calon Peacekeepers mengenai aturan, prosedur pelibatan, serta penanganan persoalan sebelum mereka melaksanakan tugas di daerah misi yang ditentukan PBB. Selama pelatihan ini, para calon Peacekeepers akan menerima materi yang telah ditetapkan PBB, yaitu Core Pre-Deployment Training Material (CPTM). Para ahli memiliki pandangan yang relatif serupa mengenai arti, tujuan, dan manfaat pelatihan. Sumantri (2000) misalnya, mendefinisikan pelatihan sebagai proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan metode dan prosedur sistematis serta terorganisir, di mana peserta mempelajari pengetahuan dan keterampilan praktis untuk tujuan tertentu.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena kesiapan pasukan secara komprehensif berdasarkan pengalaman para pelaku yang terlibat langsung dalam penyiapan dan pelaksanaan operasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi lapangan, Wawancara mendalam terhadap pejabat PMPP TNI, unsur Mabes TNI, Komandan Satgas, staf operasi, dan personel



yang pernah bertugas dalam misi UNIFIL; dan Studi dokumentasi terhadap laporan operasi, regulasi TNI, dokumen PMPP TNI, dan dokumen PBB.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis menggunakan Teori Strategi Arthur Lykke dengan pendekatan Ends–Ways–Means, Teori Kesiapan, Teori Kemampuan, Teori Kapabilitas, dan Konsep Strategi Pertahanan Darat.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Pelaksanaan persiapan komponen personel pasukan TNI pada pelaksanaan tugas Satgas Yonmek TNI XXIII-Q/UNIFIL Pada Misi UNIFIL Di Lebanon**

Pelaksanaan persiapan komponen personel pada Satgas Yonmek TNI XXIII-Q/UNIFIL merupakan salah satu tahapan krusial dalam menjamin keberhasilan misi perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembahasan ini menganalisis kesiapan tersebut dengan memadukan teori dan konsep yang telah dipilih sebelumnya dan secara empiris diwujudkan melalui kebijakan dan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh PMPP TNI serta satuan-satuan pendukungnya.

##### **a. Penyiapan Militer dan Sistem Kesiapan Terpadu**

Dalam perspektif strategis, penyiapan militer merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan operasi untuk memastikan kemampuan tempur, moral, serta logistik satuan berada pada kondisi optimal (Rosen, 2003). Berdasarkan data lapangan, PMPP TNI menerapkan sistem penyiapan terpadu yang menggabungkan empat komponen utama: seleksi personel, pembinaan fisik-mental, pelatihan pra-penugasan, dan evaluasi kesiapan.

Hasil observasi terhadap dokumen PMPP TNI (2024) memperlihatkan bahwa proses seleksi awal bagi calon anggota Satgas Yonmek XXIII-Q dilaksanakan secara berlapis di tingkat Kodam, Divif, hingga pusat. Proses ini menilai kelayakan administratif, psikologis, dan teknis—termasuk penguasaan bahasa Inggris dasar, kemampuan komunikasi, serta stabilitas mental. Sistem tersebut mencerminkan prinsip individual readiness dalam teori Rosen, yaitu bahwa kesiapan kolektif suatu pasukan sangat bergantung pada kesiapan individu setiap prajuritnya.

Lebih jauh, hasil analisis menunjukkan bahwa pembinaan mental dan fisik menjadi elemen paling berpengaruh terhadap kesiapan tempur dan moral pasukan. Data dari situs PMPP TNI mencatat, setiap gelombang latihan pra-tugas mencakup minimal 10 minggu program intensif yang meliputi Rules of Engagement (ROE), Protection of Civilians, International Humanitarian Law, dan Civil–Military Coordination (CIMIC) (PMPP TNI, 2024). Program ini menekankan keseimbangan antara kemampuan bertempur dan kepekaan kemanusiaan—dua nilai yang menjadi ciri khas pasukan penjaga perdamaian modern.

Dari wawancara dan pengolahan data, terlihat pula bahwa penyiapan ini diarahkan tidak hanya pada kemampuan teknis, tetapi juga mission awareness dan pemahaman budaya lokal



---

Lebanon. Pendekatan ini penting mengingat medan UNIFIL adalah wilayah sensitif yang menuntut pengendalian emosi dan disiplin tinggi. Hal ini sejalan dengan konsep comprehensive readiness, di mana kesiapan diukur bukan hanya dari kemampuan fisik tetapi juga dari kemampuan beradaptasi terhadap konteks sosial dan politik di wilayah misi (Tippe, 2018).

b. Keterkaitan dengan Konsep Standby Force dan PCRS PBB

Pelaksanaan penyiapan Satgas Yonmek TNI XXIII-Q juga dapat dianalisis dalam kerangka konsep standby force yang dikembangkan oleh United Nations Peacekeeping Capability Readiness System (PCRS). Sistem PCRS mengharuskan setiap negara penyumbang pasukan (troop contributing country – TCC) memiliki satuan siap-pakai (on-call units) dengan standar pelatihan dan peralatan tertentu (United Nations DPO, 2023). Indonesia, melalui PMPP TNI, telah menempatkan sejumlah satuan TNI di level 2 PCRS, artinya siap diberangkatkan dalam waktu 60 hari setelah permintaan resmi PBB.

Implementasi konsep ini terlihat jelas dalam persiapan Satgas Yonmek XXIII-Q. Seluruh tahapan pra-tugas mulai dari latihan hingga inspeksi kesiapan dilaksanakan sesuai PCRS Standard Operating Procedures. Sebagai contoh, Logistic Readiness Inspection (LRI) dilakukan bersama perwakilan UNDPO untuk memastikan kesesuaian spesifikasi kendaraan lapis baja Anoa 6×6, senjata individu, dan perlengkapan komunikasi (UN Peacekeeping, 2024). Melalui keterlibatan langsung lembaga internasional, TNI tidak hanya memenuhi kriteria nasional tetapi juga mematuhi standar kesiapan global.

Dalam konteks ini, penyiapan personel Satgas Yonmek menjadi bukti kesiapan Indonesia dalam membangun standby peacekeeping force yang profesional dan berdaya saing internasional. Fakta bahwa Indonesia menempati posisi kedelapan dunia dalam kontribusi pasukan penjaga perdamaian menunjukkan hasil nyata dari kesiapan tersebut (UN Peacekeeping Data Dashboard, 2024).

c. Kompetensi Personel dan Kinerja Satgas Yonmek

Dalam kerangka teori kompetensi, McClelland (1973) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik mendasar dari seseorang yang berkaitan langsung dengan performa unggul dalam pekerjaan. Boyatzis (1982) menambahkan bahwa kompetensi mencakup tiga domain utama: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ketiga domain tersebut tampak nyata dalam struktur pembinaan Satgas Yonmek TNI XXIII-Q.

- 1) Pertama, kompetensi pengetahuan diperoleh melalui pembelajaran intensif di PMPP TNI dan Mission Induction Training di Markas UNIFIL Naqoura. Materi meliputi hukum humaniter, prosedur komunikasi radio internasional, dan taktik patroli multinasional.
- 2) Kedua, kompetensi keterampilan diasah melalui latihan Mission Rehearsal Exercise (MRE), di mana setiap kompi melaksanakan simulasi operasi gabungan dengan pasukan Spanyol dan Nepal.

- 
- 3) Ketiga, kompetensi sikap dibentuk melalui pembinaan moral dan kegiatan Cultural Awareness Training yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan profesionalisme.

Analisis peneliti menemukan bahwa integrasi ketiga kompetensi ini menghasilkan profil prajurit yang adaptif dan berorientasi misi. Hal ini tampak pada hasil Mission Evaluation Report yang dikeluarkan oleh UNIFIL (2024), di mana kontingen Indonesia mendapat catatan positif atas kedisiplinan, kepatuhan terhadap ROE, dan kemampuan membangun hubungan baik dengan masyarakat lokal. Capaian ini menunjukkan bahwa teori kompetensi yang diterapkan secara sistematis dalam pelatihan pra-tugas telah berhasil meningkatkan efektivitas personel di lapangan.

Kemudian, berdasarkan teori kapabilitas organisasi (Barney, 1991), keunggulan Satgas Yonmek tidak hanya berasal dari kemampuan individu, tetapi juga dari sistem manajemen dan proses pembinaan yang saling melengkapi. PMPP TNI berperan sebagai pusat koordinasi antara Mabes TNI, Kementerian Pertahanan, dan lembaga PBB. Proses latihan, pengujian, dan sertifikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sistemik tersebut.

Data empiris menunjukkan bahwa kesiapan personel juga didukung oleh fasilitas PMPP TNI Sentul yang kini dilengkapi simulation room, lapangan tembak malam, dan area latihan perkotaan. Fasilitas tersebut memungkinkan pelatihan berbasis skenario yang menyerupai kondisi Lebanon Selatan. Analisis saya menyimpulkan bahwa kesiapan ini merupakan hasil sinergi antara human competence dan institutional readiness.

Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu dicermati seperti adanya kebutuhan peningkatan kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Arab, agar komunikasi dengan masyarakat lokal lebih efektif. Kemudian juga adalah pentingnya pembaruan materi gender mainstreaming dan perlindungan anak, sebagaimana ditekankan UN Women (2023), untuk memperkuat perspektif kemanusiaan dalam operasi. Selain itu, diperlukan pula kesinambungan program after action review agar pembelajaran dari misi sebelumnya dapat ditransfer secara optimal ke satuan berikutnya.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan persiapan komponen personel Satgas Yonmek TNI XXIII-Q/UNIFIL telah memenuhi prinsip comprehensive military preparedness dengan mengintegrasikan tiga dimensi: kesiapan individual, kesiapan organisasi, dan kesiapan internasional.

- a. Kesiapan individual tercapai melalui penguasaan kompetensi inti—pengetahuan, keterampilan, dan sikap—yang diasah melalui latihan dan pembinaan berkelanjutan.
- b. Kesiapan organisasi terwujud melalui sistem manajemen pelatihan dan logistik yang terintegrasi di bawah PMPP TNI, yang berfungsi sesuai mandat PCRS PBB.
- c. Kesiapan internasional diwujudkan melalui kesesuaian standar latihan dengan dokumen Core Pre-Deployment Training Materials (CPTM 2023) PBB, menjadikan kontingen Indonesia setara dengan pasukan negara maju.



---

Dengan demikian, pelaksanaan persiapan personel tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat administratif sebelum keberangkatan, tetapi merupakan proses strategis untuk membangun kapabilitas pertahanan nasional dalam konteks global. Satgas Yonmek TNI XXIII-Q menjadi representasi nyata dari kesiapan Indonesia sebagai reliable standby force di kawasan Asia Pasifik dan sebagai pelaku diplomasi pertahanan yang profesional di bawah bendera PBB.

#### **4.2 Strategi kesiapan pasukan TNI pada pelaksanaan tugas Satgas Yonmek TNI XXIII-Q/UNIFIL Pada Misi UNIFIL Di Lebanon.**

Strategi kesiapan pasukan TNI dalam misi UNIFIL tidak hanya sekadar penyiapan teknis untuk menjalankan mandat PBB, melainkan juga instrumen strategis diplomasi pertahanan yang menunjukkan profesionalitas dan kredibilitas militer Indonesia di kancah internasional. Pembahasan ini menelaah strategi tersebut dengan menaunkannya pada teori strategi (Ends–Ways–Means), teori kesiapan organisasi (Rosen, 2003), dan strategi pertahanan adaptif (Tippe, 2018), kemudian dikaitkan dengan kondisi empiris Satgas Yonmek TNI XXIII-Q tahun 2023–2024.

Secara strategis, tujuan (ends) dari keterlibatan TNI di UNIFIL adalah memperkuat kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sekaligus membangun postur pertahanan yang adaptif melalui pengalaman operasi multinasional. Cara (ways) yang ditempuh meliputi penguatan kompetensi personel, peningkatan interoperabilitas, serta pengembangan sistem logistik dan kepemimpinan lapangan yang responsif. Sarana (means) yang digunakan mencakup dukungan alutsista produksi dalam negeri, sistem pelatihan PMPP TNI, serta kebijakan lintas-institusi antara Kemhan, Kemlu, dan Mabes TNI (Lykke, 1996).

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa strategi kesiapan Satgas Yonmek XXIII-Q dibangun melalui tiga lapisan: kesiapan operasional (personel, taktik, dan teknologi), kesiapan logistik (peralatan dan sistem pendukung), serta kesiapan diplomasi (hubungan multinasional dan kepercayaan publik). Ketiganya membentuk model strategi pertahanan adaptif sebagaimana dikemukakan Tippe (2018), di mana sistem pertahanan harus mampu merespons perubahan lingkungan strategis secara cepat dan berkelanjutan.

Implementasi strategi ini tercermin pada keberhasilan kontingen Indonesia menjaga stabilitas di Area of Responsibility (AoR) seluas 84 km<sup>2</sup> di Sektor Timur Lebanon. Berdasarkan laporan UNIFIL (2024), kontingen Indonesia melaksanakan lebih dari 450 kegiatan patroli gabungan dan operasi pengawasan garis biru tanpa pelanggaran berat (zero violation). Keberhasilan ini menandakan efektivitas strategi kesiapan dalam menghasilkan pasukan profesional, adaptif, dan mampu menjaga disiplin tinggi di lingkungan multinasional.

Meskipun strategi kesiapan berjalan baik, terdapat sejumlah hambatan yang diidentifikasi dari hasil wawancara dan observasi lapangan.

- a. Pertama, keterbatasan logistik dan kemandirian suku cadang. Sebagian besar kendaraan Anoa dan ARV yang dikirim ke Lebanon memerlukan suku cadang dari Indonesia, sehingga waktu perbaikan menjadi lebih lama dibanding kontingen negara lain yang memiliki basis perawatan di Timur Tengah.

- 
- b. Kedua, perbedaan bahasa dan budaya organisasi multinasional menjadi tantangan bagi efektivitas komunikasi taktis. Walaupun seluruh anggota Satgas telah mendapat pelatihan bahasa Inggris, interaksi di lapangan dengan kontingen Spanyol, Nepal, India, dan Ghana sering kali memerlukan penerjemahan tambahan.
  - c. Ketiga, kesiapan mental dan rotasi personel. Penugasan selama 12 bulan menimbulkan tekanan psikologis akibat jarak dengan keluarga dan intensitas patroli tinggi. PMPP TNI mencatat beberapa kasus kelelahan dan stres yang perlu intervensi konseling (PMPP TNI, 2024).
  - d. Keempat, transformasi teknologi dan doktrin PBB yang dinamis. UNIFIL terus memperbarui sistem pelaporan digital dan prosedur keamanan, seperti Smart Camp Security System dan UAV Surveillance Protocol. TNI perlu mempercepat adaptasi agar tidak tertinggal secara teknologis.

Dari keempat tantangan tersebut, peneliti menilai bahwa strategi kesiapan ke depan perlu memperkuat pendekatan komprehensif antara dimensi manusia, teknologi, dan sistem kelembagaan.

Mengacu pada teori Lykke (1996), efektivitas strategi ditentukan oleh keseimbangan antara ends, ways, dan means. Jika salah satu komponen melemah, strategi menjadi tidak stabil. Dalam konteks Yonmek XXIII-Q/UNIFIL, ends (tujuan strategis) telah jelas menjadi simbol diplomasi pertahanan dan penguatan profesionalisme TNI. Ways (cara) telah dilaksanakan melalui latihan, penguatan interoperabilitas, dan pembinaan kepemimpinan. Namun pada aspek means (sarana), masih terdapat celah pada dukungan logistik dan teknologi informasi.

Rosen (2003) menjelaskan bahwa kesiapan organisasi militer ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap inovasi dan perubahan taktis. Satgas Yonmek telah menunjukkan kapasitas tersebut melalui Mission Rehearsal Exercise (MRE) dan Command Post Exercise (CPX), namun pembaruan peralatan komunikasi dan sistem navigasi tetap diperlukan agar sesuai dengan standar UNIFIL yang semakin digital.

Tippe (2018) mengemukakan bahwa strategi pertahanan adaptif harus bersifat dinamis, menggabungkan hard power dan soft power. Yonmek XXIII-Q telah mengimplementasikan hal ini melalui dua dimensi: patroli keamanan (hard power) dan kegiatan kemanusiaan (soft power) seperti CIMIC Program, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi sekolah di Blate dan Adchit. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat lokal terhadap PBB dan TNI.

Berdasarkan identifikasi hambatan dan teori strategi di atas, peneliti merumuskan beberapa langkah strategis yang realistis dan dapat diterapkan oleh TNI untuk memperkuat kesiapan kontingen mendatang:

- a. Optimalisasi Sistem Logistik Forward. Mengembangkan Forward Maintenance Center di Markas UNIFIL Naqoura bekerja sama dengan negara sahabat agar proses perawatan kendaraan dan peralatan tidak sepenuhnya bergantung pada pengiriman dari Indonesia. Langkah ini sesuai prinsip efisiensi logistik militer yang menuntut rantai pasok pendek dan respons cepat (Kemhan RI, 2023).

- 
- b. Digitalisasi Komando dan Pelaporan. Implementasi sistem digital berbasis Peacekeeping Operation Dashboard untuk memantau kondisi personel, kendaraan, dan aktivitas patroli secara real-time. Sistem serupa telah digunakan di misi MONUSCO dan MINUSCA, dan terbukti meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan (UN DPO, 2023).
  - c. Peningkatan Kapasitas Bahasa dan Interkultural. Meningkatkan pelatihan bahasa asing, terutama Arab dan Perancis, karena merupakan bahasa operasional di Lebanon. PMPP TNI dapat bekerja sama dengan Lembaga Bahasa Kemhan atau Atase Pertahanan Indonesia di Kairo untuk menyediakan pelatihan intensif.
  - d. Penguatan Dukungan Psikologis dan Keluarga. Membentuk Family Support Cell di bawah PMPP TNI yang berfungsi memberi dukungan komunikasi daring, konseling keluarga, dan monitoring moral prajurit selama misi. Langkah ini akan meningkatkan psychological resilience yang berpengaruh langsung terhadap performa lapangan.
  - e. Integrasi Teknologi Dalam Latihan Pra-Tugas. Mengadaptasi pelatihan berbasis simulasi (Virtual Battle Space Training System) untuk mereplikasi skenario Lebanon Selatan — termasuk ancaman UAV dan IED (Improvised Explosive Device). Dengan begitu, prajurit dapat mengantisipasi bentuk ancaman non-konvensional tanpa risiko nyata.
  - f. Kemandirian Peralatan dan Industri Pertahanan. Melibatkan PT Pindad dan PT LEN Industri untuk menyediakan on-site technical support di UNIFIL selama satu tahun penugasan. Langkah ini akan memperpendek waktu perawatan dan menjadi promosi nyata industri pertahanan nasional di forum internasional.
  - g. Institutional Learning Continuity. Memperkuat sistem Peacekeeping Knowledge Management yang telah ada dengan membuat “bank data operasi” yang terintegrasi antara PMPP TNI dan Mabes TNI. Setiap hasil AAR (After Action Review) Satgas Yonmek dapat diunggah dan digunakan sebagai acuan perencanaan misi berikutnya.

Langkah-langkah tersebut menjadi wujud konkret dari strategi adaptif TNI yang berbasis teori dan empiris, serta sejalan dengan prinsip continuous improvement dalam organisasi militer modern (Senge, 1990).

Berdasarkan pembahasan diatas menunjukkan bahwa strategi kesiapan Satgas Yonmek TNI XXIII-Q/UNIFIL merupakan implementasi nyata konsep strategi pertahanan multidimensi yang menggabungkan aspek militer, diplomasi, teknologi, dan kemanusiaan. Strategi ini berhasil membangun pasukan yang tidak hanya siap secara operasional, tetapi juga memiliki kesadaran geopolitik dan kemampuan diplomatik. Namun, keberhasilan tersebut harus diiringi dengan reformasi berkelanjutan. Tantangan logistik, adaptasi teknologi, dan pembinaan psikologis prajurit memerlukan pendekatan strategis baru yang lebih inovatif. Kesiapan masa depan bergantung pada kemampuan TNI menjaga keseimbangan antara ends—ways—means serta mengadopsi prinsip learning organization dalam setiap misi perdamaian.

## e) **KESIMPULAN DAN SARAN**

### a. **Kesimpulan.**

---

**1) Pelaksanaan persiapan komponen personel pasukan TNI pada pelaksanaan tugas Satgas Yonmek TNI XXIII-Q/UNIFIL Pada Misi UNIFIL Di Lebanon**

Pelaksanaan persiapan komponen personel Satgas Yonmek TNI XXIII-Q/UNIFIL merupakan hasil integrasi antara sistem pembinaan satuan TNI, kebijakan diplomasi pertahanan nasional, dan standar kesiapan PBB. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tahapan persiapan yang dilaksanakan oleh Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP TNI) telah berjalan terpadu, terukur, dan berorientasi kompetensi.

Proses seleksi personel dilakukan secara ketat melalui penilaian administratif, fisik, psikologis, dan kemampuan teknis. Setelah itu, pelatihan pra-penugasan (Pre-Deployment Training) dilaksanakan selama lebih dari sepuluh minggu dengan materi berstandar PBB seperti Rules of Engagement, Protection of Civilians, Civil–Military Coordination, dan International Humanitarian Law. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kelulusan hampir sempurna, menandakan efektivitas kurikulum yang disusun berdasarkan Core Pre-Deployment Training Materials (CPTM 2023) PBB.

Dari sisi kesiapan moral dan psikologis, pembinaan rohani, konseling, dan family readiness briefing terbukti memperkuat ketahanan mental prajurit. Dukungan keluarga dan kegiatan pembinaan spiritual menjadi fondasi moral yang menjaga semangat dan disiplin selama penugasan jangka panjang. Keterlibatan langsung pimpinan PMPP TNI dan veteran misi perdamaian dalam memberi motivasi memperkuat kepercayaan diri personel menghadapi medan operasi.

Penyiapan ini juga sesuai dengan konsep standby force dalam sistem Peacekeeping Capability Readiness System (PCRS) PBB. Satgas Yonmek TNI XXIII-Q/UNIFIL menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang berada pada tingkat kesiapan level-2, siap dikerahkan dalam waktu 60 hari. Implementasi konsep tersebut membuktikan kesiapan Indonesia sebagai reliable peacekeeping nation dan meningkatkan reputasi TNI sebagai pasukan profesional di kawasan Asia Pasifik.

Dari perspektif kompetensi, kesiapan personel mencakup tiga domain utama: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan diperoleh melalui pelatihan intensif dan pembelajaran misi; keterampilan diasah melalui latihan lapangan seperti Mission Rehearsal Exercise; dan sikap dibentuk melalui pembinaan nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta pemahaman budaya lokal Lebanon. Integrasi ketiganya menghasilkan prajurit adaptif dan berorientasi misi, sebagaimana terlihat dari hasil penilaian UNIFIL (2024) yang menempatkan kontingen Indonesia dalam kategori sangat baik pada aspek disiplin dan kerja sama multinasional.

Dengan demikian, pelaksanaan persiapan komponen personel Satgas Yonmek TNI XXIII-Q/UNIFIL dapat disimpulkan sebagai model kesiapan terpadu yang memenuhi tiga dimensi kesiapan:

- a. Kesiapan individual melalui peningkatan kompetensi dan pembinaan moral;

- 
- b. Kesiapan organisasi melalui koordinasi sistem pelatihan dan logistik PMPP TNI;
  - c. Kesiapan internasional melalui kesesuaian dengan standar PCRS PBB.

**2) Strategis dalam Menghadapi Ancaman Perang Modern Strategi kesiapan pasukan TNI pada pelaksanaan tugas Satgas Yonmek TNI XXIII-Q/UNIFIL Pada Misi UNIFIL Di Lebanon.**

Strategi kesiapan Satgas Yonmek TNI XXIII-Q/UNIFIL merupakan penerapan nyata dari konsep Ends–Ways–Means dalam strategi pertahanan nasional dan diplomasi militer Indonesia. Tujuan strategis (ends) adalah memperkuat kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia serta membangun kemampuan operasional dan diplomatik TNI. Cara yang ditempuh (ways) diwujudkan melalui latihan terpadu, peningkatan interoperabilitas multinasional, pembinaan moral dan kepemimpinan, serta penguatan sistem logistik di daerah misi. Sarana pendukung (means) terdiri atas dukungan alutsista produksi dalam negeri, sumber daya manusia profesional, serta kebijakan lintas-institusi antara Kemhan, Kemlu, dan Mabes TNI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kesiapan tersebut berhasil diterapkan secara efektif, namun tetap menghadapi sejumlah tantangan yang harus dijawab dengan langkah strategis baru. Hambatan utama mencakup keterbatasan suku cadang alutsista di daerah operasi, perbedaan bahasa dan budaya antar-kontingen, tekanan psikologis akibat durasi penugasan panjang, serta perubahan teknologi dan doktrin digitalisasi PBB.

Menanggapi tantangan itu, dirumuskan beberapa langkah strategis implementatif (ways) yang memperkuat strategi kesiapan TNI ke depan:

- a. Optimalisasi sistem logistik forward melalui pembentukan Forward Maintenance Center di Markas UNIFIL Naqoura bekerja sama dengan negara sahabat agar proses perawatan tidak bergantung penuh pada pengiriman dari dalam negeri.
- b. Digitalisasi komando dan pelaporan dengan penerapan Peacekeeping Operation Dashboard berbasis real-time data guna meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan di lapangan.
- c. Peningkatan kapasitas bahasa dan kompetensi interkultural, terutama Arab dan Perancis, melalui kerja sama PMPP TNI dengan lembaga bahasa Kemhan serta atase pertahanan di Timur Tengah.
- d. Penguatan dukungan psikologis dan keluarga dengan membentuk Family Support Cell di bawah PMPP TNI untuk memberikan konseling daring, komunikasi keluarga, dan pemantauan moral prajurit selama misi.

- e. Integrasi teknologi pelatihan virtual melalui sistem simulasi Virtual Battle Space (VBS) agar prajurit terbiasa dengan skenario ancaman non-konvensional seperti UAV atau IED.
- f. Kemandirian industri pertahanan dengan menugaskan teknisi PT Pindad dan PT LEN Industri sebagai on-site support team di Lebanon, sekaligus memperkenalkan kemampuan teknologi pertahanan nasional ke komunitas internasional.
- g. Penguatan pembelajaran organisasi berkelanjutan melalui pengembangan Peacekeeping Knowledge Management System PMPP TNI yang memuat hasil evaluasi dan after action review setiap kontingen.

Analisis strategis menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut sejalan dengan teori kesiapan organisasi Rosen (2003) dan konsep strategi pertahanan adaptif Tippe (2018), yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kemampuan militer, inovasi teknologi, dan aspek kemanusiaan. Dengan demikian, strategi kesiapan pasukan TNI pada misi UNIFIL tidak hanya berfungsi untuk memastikan keberhasilan operasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran strategis bagi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang profesional, modern, dan berdaya saing internasional.

**a. Saran.**

Mengacu pada hasil pembahasan penelitian ini direkomendasikan pula kepada kementerian dan Lembaga serta TNI sebagai berikut:

1. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI)
  - a) Merumuskan kebijakan jangka panjang penguatan kapasitas misi perdamaian dalam Rencana Strategis Pertahanan 2025–2034, dengan menjadikan peacekeeping readiness sebagai salah satu indikator kemandirian pertahanan nasional.
  - b) Mengintegrasikan industri pertahanan nasional dengan kebutuhan misi PBB. Kemhan dapat mendorong keterlibatan PT Pindad, PT LEN Industri, dan PT DI sebagai penyedia layanan teknis (on-site technical support) di markas UNIFIL, sehingga misi perdamaian juga menjadi sarana diplomasi industri pertahanan.
  - c) Meningkatkan dukungan anggaran riset dan inovasi pertahanan bagi lembaga pendidikan seperti Unhan dan Balitbang Kemhan untuk penelitian evaluatif pasca-misi (after-mission evaluation), guna memperkuat pembelajaran strategis dari setiap kontingen.
2. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI)
  - a) Meningkatkan sistem pembinaan satuan calon kontingen PBB dengan menerapkan Integrated Mission Readiness Cycle (IMRC) yang mencakup tahapan seleksi, latihan, penugasan, dan evaluasi pascapenugasan, sehingga transfer pengalaman antar-satgas dapat berjalan sistematis.
  - b) Membangun Forward Logistic Network antar-kontingen Indonesia di luar negeri, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika, untuk

- 
- memperpendek rantai pasok logistik dan meningkatkan efisiensi pemeliharaan alutsista.
- c) Mengoptimalkan fungsi Center of Excellence PMPP TNI sebagai lembaga pembinaan multinasional. Mabes TNI dapat memperkuat kerja sama dengan United Nations Department of Peace Operations (UNDPO) serta negara sahabat dalam penyelenggaraan latihan gabungan dan pertukaran instruktur.
  - d) Mendorong regenerasi kepemimpinan dan karier internasional prajurit. Penugasan UNIFIL dapat dijadikan career milestone dalam sistem promosi perwira menengah TNI, agar pengalaman internasional menjadi bagian dari kompetensi strategis kepemimpinan militer Indonesia.
3. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI)
- a) Meningkatkan integrasi pelatihan digital dan simulasi virtual. PMPP TNI dapat menggunakan Virtual Battle Space (VBS) atau sistem sejenis untuk melatih prajurit menghadapi skenario non-konvensional seperti ancaman UAV dan IED yang marak di UNIFIL.
  - b) Mengembangkan Family Support and Mental Resilience Program. Program ini penting untuk memantau kondisi moral, psikologis, dan komunikasi keluarga prajurit selama penugasan, sehingga menekan risiko kelelahan mental di daerah operasi.
  - c) Meningkatkan program pelatihan bahasa Arab dan Perancis. Bahasa tersebut digunakan secara luas di Lebanon, sehingga peningkatan kemampuan linguistik akan memperkuat efektivitas komunikasi antar-kontingen dan masyarakat lokal.
4. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI)
- a) Memperkuat koordinasi diplomasi pertahanan dengan Kemhan dan TNI. Kemlu dapat memperluas peran Atase Pertahanan dalam forum-forum PBB dan menginisiasi kerja sama pelatihan dengan UN Department of Peace Operations (DPO) agar Indonesia selalu terlibat dalam Force Generation Conference tingkat global.
  - b) Mendorong diplomasi berbasis hasil (outcome based diplomacy) dengan menonjolkan kinerja kontingen Indonesia sebagai alat promosi reputasi internasional dan pencalonan posisi strategis di PBB, misalnya sebagai Force Commander atau Deputy Head of Mission.
  - c) Mendukung agenda pengarusutamaan perempuan dalam misi perdamaian. Kemlu dapat memfasilitasi program pelatihan bagi female peacekeepers Indonesia agar berpartisipasi lebih luas dalam misi UNIFIL, sejalan dengan resolusi DK PBB 1325 tentang Women, Peace and Security.

## DAFTAR PUSTAKA

Arthur F. Lykke Jr. (1996). *Military Strategy: Theory and Application*.

Amrulloh, M. H., Purwanto, S., Hutajulu, B., & Siagian, F. (2025). Strategi Kodam XVII/Cenderawasih dalam Pemenuhan Personel guna Mendukung Kesiapan Operasi di



- 
- Papua. *Sparta Multidisciplinary Journal*, 1(1), 16-32. Bayu Widyoseno. (2024). Efektivitas Peran United Nations Interim Force in Lebanon dalam Penyelesaian Konflik Israel–Hizbullah Tahun 2023. *Diplomacy and Global Security Journal*, 1(1), 517–531.
- Hermansah, F., Mahroza, J., Halkis, M., Prakoso, L. Y., Purwanto, S., & Sutanto, R. (2018). & David, L.(2024). *Diplomasi Pertahanan Indonesia Afganistan dalam Penyelesaian Perdamaian Tahun, 2023*.
- Hipdizah, H., Purwanto, S., Hendarwoto, Y., Duarte, R., Siagian, F., & Anggraeni, D. (2025). Buku ajar doktrin militer. *YPAD Penerbit*.
- Kaunang, E. S., Hadiano, M., & Purwanto, S. (2024). THE STRATEGIC, MILITARY AND COUNTERINSURGENCYTACTICS OF THE PERMESTA MOVEMENT (CASE STUDY GUERILLA WARFARE IN SULAWESI). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6), 4059-4076.
- Mardes, S., Putra, Y., Purwanto, S., Putri, R. D., & Ramadhani, E. (2026). Cultural beliefs and mental health: Exploring Ethiopia's spiritual and societal pathways. *Explore (New York, NY)*, 22(3), 103346-103346.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Nasution, M. F., Adriyanto, A., & Simanjuntak, H.D.A. (2024). Pendekatan Strategis dan Operasional Kontingen Garuda XXXIX-D MONUSCO dalam Menjaga Perdamaian Dunia. *JEHSS*, 7(2), 742–758.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2023). *United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian.
- Purwanto, S., Basalamah, S., Mallongi, S., & Sukmawati, S. (2020). Effects of Recruitment, Leadership, and Local Culture on Discipline and Performance of Garuda Contingent Soldiers in Lebanon. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 606-618.
- Purwanto, S., & Siagian, F. (2025). Strategic human resources management in the global era: Navigating opportunities and challenges. *Centurion MSPD Journal*, 1(1), 1-13.
- Purwanto, S., & Ilhamsyah, I. (2025). Army Human Resources Development Strategy through Human Capital Approach. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(1), 1-22.
- Prasetiawan, H. P., AR, D. D., & Purwanto, S. (2025). THE STRATEGY TO IMPROVE THE CHARACTER OF MILITARY ACADEMY CADETS THROUGH THE ROLE OF MENTORS IN SHAPING PROFESSIONAL OFFICERS TO SUPPORT THE MAIN DUTIES OF THE INDONESIAN ARMY. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(6), 2184-2191.



- 
- Sriyanto. (2022). Kapabilitas Pasukan Perdamaian Indonesia di Republik Demokratik Kongo. Jurnal Diplomasi Pertahanan, 8(1).
- Veriandy, M. V., Abidin, A. Z., & Cahyandari, D. (2024). Penyerangan terhadap Pasukan UNIFIL oleh Israel dalam Perspektif Hukum Internasional. Neoclassical Legal Review, 3(2), 56–64.